



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

**PENJELASAN
MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPENAS
TENTANG
HASIL PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN
PASCABENCANA BANJIR AWAL FEBRUARI 2007
DI WILAYAH JABODETABEK
(JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI)
Jakarta, 19 Februari 2007**

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bersama, hujan yang turun di wilayah Jakarta serta di wilayah hulu dengan curah yang tinggi sejak tanggal 1 Februari 2007 sampai tiga hari berturut-turut, bahkan berlanjut hingga selama satu minggu berikutnya, telah menyebabkan bencana banjir melanda sebagian besar wilayah Jabodetabek, yang kemudian menimbulkan kerusakan dan kerugian yang tidak sedikit terhadap aset-aset publik, swasta, serta masyarakat, dan yang pada gilirannya kemudian mengganggu perekonomian dan kehidupan masyarakat pada umumnya.

Sebagai respon terhadap kejadian bencana banjir ini, Presiden RI telah menugaskan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas untuk melakukan penilaian kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana banjir di wilayah Jabodetabek, secara cepat (*Quick Damage and Loss Assessment*).

Atas penugasan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan penilaian cepat terhadap kerusakan dan kerugian yang disusun berdasarkan masukan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek, memperoleh bantuan teknis dari UNDP.

Kegiatan penilaian cepat ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran sampai berapa besar kerusakan dan kerugian yang ditanggung oleh semua pihak, pemerintah, masyarakat dan swasta, serta seberapa besar dampak bencana

banjir ini mempengaruhi ekonomi makro, baik di tingkat regional Jabodetabek maupun di tingkat nasional.

Penilaian Kerusakan dan Kerugian (*Damage and Loss Assessment/DLA*) ini menggunakan metode ECLAC (*UN-Economic Commission for Latin America and Caribbean*, atau Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin dan Negara-Negara Karibia) yang sudah umum digunakan untuk menilai dampak pascabencana secara internasional, termasuk yang digunakan untuk menilai kerusakan dan kerugian pascabencana tsunami di Aceh pada akhir tahun 2004 dan pascabencana gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Mei 2006 yang lalu.

Ada pun tujuan dari penilaian kerusakan dan kerugian ini adalah untuk:

- a. menilai kerusakan yang terjadi pada prasarana dan sarana publik dan nonpublik;
- b. menilai kerugian yang terjadi dan dampaknya terhadap masyarakat, daerah dan negara;
- c. melihat dampak kerusakan dan kerugian terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. merekomendasikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana di masa mendatang; dan
- e. memberikan masukan bagi perkiraan kebutuhan pendanaan bagi pemulihan pascabencana.

Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana banjir di wilayah Jabodetabek dilakukan Tim dari Bappenas dengan bantuan teknis dari UNDP sejak tanggal 5 hingga 15 Februari 2007; telah dilaporkan kemajuannya setiap hari kepada Presiden RI, dan difinalkan melalui laporan akhir yang telah dilaporkan kepada Presiden RI pada hari Jumat, 16 Februari 2007.

Laporan Akhir tersebut merupakan laporan terpadu dan terkonsolidasi (*consolidated report*) tentang hasil penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana banjir di wilayah Jabodetabek sampai dengan tanggal 15 Februari 2007.

B. PERBANDINGAN BANJIR JABODETABEK TAHUN 2002 DAN 2007

Bencana banjir pada awal bulan Februari 2007 ini secara kasat mata terlihat memberikan akibat yang lebih parah dibandingkan dengan bencana banjir tahun

2002 lalu, namun hasil perhitungan penilaian kerusakan dan kerugian menunjukkan kondisi yang relatif tidak berbeda secara signifikan (Tabel 1).

Tabel 1:
Perbandingan Bencana Banjir Jabodetabek Tahun 2002 dan 2007

Deskripsi	Tahun 2002*	Tahun 2007**
Curah Hujan	361,7 mm (rata-rata DKI Jakarta selama 10 hari)	327 mm (rata-rata Jabodetabek selama 6 hari)
Luas genangan	331 km ² di Jakarta 100 km ² di Bodetabek	454,8 km ² di Jakarta 221 km ² di Tangerang dan sekitarnya 250 km ² total Depok, Bogor dan Bekasi
Korban Jiwa	80 orang	79 orang (status 12 Feb 07)
Jumlah pengungsi	381 orang	590.407 (status 6 Feb 07)
Dampak kerusakan***	Langsung: Rp. 5,4 T Ekonomi: Rp. 4,5 T	Langsung: Rp. 5,2 T Ekonomi (dampak tidak langsung): Rp. 3,6 T

Catatan:

*) Sumber: Majalah Tempo, 18 Februari 2007

***) Sumber: SATKORLAK PBP DKI Jakarta dan media masa Februari 2007

***) Sumber: Bank Dunia 2002 (untuk tahun 2002) dan Hasil Analisis Bappenas (untuk tahun 2007)

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk bencana banjir Februari 2007, diperkirakan total nilai kerusakan dan kerugian yang diderita oleh masyarakat dan pemerintah mencapai Rp5,2 triliun, sementara kerugian ekonomi tidak langsung (*indirect potential economic loss*) mencapai Rp3,6 triliun.

C. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN

Analisis yang dilakukan oleh Tim Bappenas menggunakan data yang diperoleh dari berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek, dengan data dan asumsi yang digunakan dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. Kerusakan dan kerugian di sektor perumahan.** Sekitar 146 ribu rumah penduduk di wilayah Jabodetabek (termasuk di wilayah DKI Jakarta yang mencapai hingga 90 ribu rumah) yang tergenang, dengan kondisi rusak ringan, rusak berat atau hilang karena hanyut tersapu banjir. Dengan menggunakan beberapa asumsi karena belum tersedianya validasi data yang rinci, maka nilai kerusakan dan kerugian di sektor perumahan mencapai Rp.1,13 triliun (rincian pada tabel 2), dengan asumsi yang digunakan:

- a. Komposisi rumah hilang karena tersapu banjir, rumah rusak berat dan rusak ringan yaitu berturut-turut sebesar 10%, 15% dan 75%.
- b. Nilai kerugian yang diderita karena rumah hilang rata-rata sebesar Rp10 juta per rumah, termasuk nilai terhadap kerugian harta bendanya, dengan pertimbangan bahwa rumah hilang umumnya merupakan rumah nonpermanen di bantaran sungai.
- c. Sementara nilai terhadap kerusakan dan kerugian yang diderita pemilik yang rumahnya mengalami rusak berat, termasuk kerusakan dan kerugian furniture, peralatan serta pakaian, diperkirakan sebesar rata-rata Rp20 juta per rumah.
- d. Sedangkan untuk nilai kerusakan dan kerugian yang dialami rumah yang rusak ringan, termasuk furniture dan peralatan rumah, nilainya sebesar Rp5 juta per rumah.
- e. Selain bangunan rumah yang terendam, maka prasarana lingkungan perumahan juga rusak terendam air. Untuk itu diasumsikan bahwa nilai prasana lingkungan ini sebesar 15% dari total nilai kerusakan dan kerugian sektor perumahan. Dengan demikian secara keseluruhan kerusakan dan kerugian di sektor perumahan mencapai Rp1,3 triliun.
- f. Perhitungan dan asumsi nilai yang diterapkan untuk sektor perumahan ini, memperhatikan pengalaman yang dilakukan untuk pemulihan sektor perumahan pascabencana gempa bumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah, serta pascabencana tsunami di Pangandaran pada pertengahan tahun 2006 yang lalu.

Tabel 2
Kerusakan Rumah serta Perkiraan Nilai Kerusakan dan Kerugian

Propinsi / Wilayah	Klasifikasi Kerusakan Rumah Terendam dan Perkiraan Nilai							
	Hilang		Rusak Berat		Rusak Ringan		Total	
	Unit	Rp. 10 jt /unit	Unit	Rp. 20 jt / unit	Unit	Rp. 5jt / unit	unit	Rp juta
Provinsi DKI Jakarta	8,977	89,770	13,466	269,310	67,328	336,638	89,770	695,718
1 Jakarta Pusat	1,529	15,289	2,293	45,867	11,467	57,334	15,289	118,490
2 Jakarta Utara	821	8,207	1,231	24,621	6,155	30,776	8,207	63,604
3 Jakarta Barat	663	6,627	994	19,881	4,970	24,851	6,627	51,359
4 Jakarta Selatan	2,330	23,297	3,495	69,891	17,473	87,364	23,297	180,552
5 Jakarta Timur	3,635	36,350	5,453	109,050	27,263	136,313	36,350	281,713
		-						
Provinsi Jawa Barat	5,297	52,972	7,946	158,916	39,729	198,645	52,972	410,533
1 Kota Bogor	45	453	68	1,359	340	1,699	453	3,511
2 Kabupaten Bogor	59	589	88	1,767	442	2,209	589	4,565
3 Kota Depok	608	6,083	912	18,249	4,562	22,811	6,083	47,143
4 Kota Bekasi	962	9,624	1,444	28,872	7,218	36,090	9,624	74,586
5 Kabupaten Bekasi	3,622	36,223	5,433	108,669	27,167	135,836	36,223	280,728
		-						
Provinsi Banten	300	3,000	450	9,000	2,250	11,250	3,000	23,250
1 Kota Tangerang		-		-		-		-
2 Kabupaten Tangerang		-		-		-		-
		-						-
TOTAL	14,574		21,861		109,307		145,742	1,129,501

Sumber:

Salkorlak PB Provisasi Jawa Barat dan media center
Hasil Analisis Tim DLA Bappenas, Februari 2007

2. **Kerusakan dan Kerugian sektor Infrastruktur.** Perkiraan nilai kerusakan dan kerugian sektor infrastruktur mencapai Rp854 miliar, yang terdiri dari nilai kerusakan fisik sebesar Rp328 miliar dan kerugian yang dialami oleh pemerintah serta BUMN/BUMD karena kehilangan pendapatan karena tidak dapat mengoperasikan fasilitas yang rusak tersebut mencapai Rp525,8 miliar. Nilai kerugian yang diperhitungkan ini baru pada tahap kerugian langsung yang dialami oleh pemerintah/BUMN/BUMD, belum termasuk kerugian tidak langsung yang dialami masyarakat pengguna atau pihak lain yang merugi akibat kerusakan sarana dan prasarana tersebut. Dari jumlah tersebut, sebagian besar atau Rp533,8 miliar merupakan aset milik pemerintah, termasuk BUMN/BUMD dan sisanya Rp320 juta merupakan aset milik swasta (rincian pada Tabel 3).

Tabel 3
Perkiraan Nilai Kerusakan dan Kerugian Sektor Infrastruktur

Sektor & Sub-sektor	Nilai (juta rupiah)			Kepemilikan (juta rupiah)	
	Kerusakan	Kerugian	Total	Publik	Swasta/masyarakat
Transportasi Darat	271,149.88	330,240.00	601,389.88	281,389.88	320,000.00
1 Jalan dan Jembatan	257,021.88		257,021.88	257,021.88	
2 Kereta api	14,128.00	9,240.00	23,368.00	23,368.00	
3 Jalan tol		1,000.00	1,000.00	1,000.00	
4 Bus Way & Organda		320,000.00	320,000.00	-	320,000.00
Energi	22,768.00	175,600.00	198,368.00	198,368.00	
1 Listrik	22,768.00	75,600.00	98,368.00	98,368.00	
2 Depo Bahan Bakar Umum	NA	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
Pos dan Telekomunikasi	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
Air dan Sanitasi	15,400.00	2,000.00	17,400.00	17,400.00	
Infrastruktur Pertanian	18,652.22	-	18,652.22	18,652.22	-
1 Irigasi Teknis	5,044.30		5,044.30	5,044.30	
2 Irigasi Non-teknis	80.00		80.00	80.00	
3 Irigasi Sederhana	20.00		20.00	20.00	
4 Tanggul & Tebing	12,836.00		12,836.00	12,836.00	
5 Pintu air	671.92		671.92	671.92	
Total	327,970.10	525,840.00	853,810.10	533,810.10	320,000.00

Sumber: Departemen PU, Pemprov Jabar, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, PDAM Kab. Bogor, PT PLN & Media, Februari 2007

3. Kerusakan dan kerugian sektor ekonomi produktif. Sektor ekonomi produktif yang tersebar di wilayah Jabodetabek, dari data yang diperoleh tercatat sejumlah industri, pasar serta PKL (pedagang kaki lima) yang menderita kerugian karena terendahnya pabrik, pasar serta fasilitas perekonomian lainnya. Tercatat kerusakan dialami oleh 75 industri besar, terutama industri otomotif dan elektronik, 560 industri tekstil di sentra industri Cipulir, 2100 unit usaha mebel yang berada di 24 sentra industri mebel di Jakarta Timur dan Pondok aren Tangerang, 16.240 PKL di lima wilayah di DKI Jakarta serta 40 pasar tradisional. Perkiraan kerusakan dan kerugian setidaknya mencapai Rp2,9 Triliun. (rincian pada Tabel 4).

Tabel 4
Perkiraan Nilai Kerusakan dan Kerugian Sektor Ekonomi

Sektor	Kerusakan (Juta Rp)	Kerugian (Juta Rp)	Total (Juta Rp)
Usaha/Industri			
Industri Besar		2,000,000.00	2,000,000.00
Usaha Kecil dan Menengah	13,650.00	729,000.00	742,650.00
Usaha Mikro Informal	530.25	46,000.00	46,530.25
Perdagangan			
Pasar	1,020.11	61,247.51	62,267.62
Pariwisata			
Pertanian, Peternakan dan Perikanan			
Pertanian	3,094.85	11,012.50	14,107.35
Peternakan		13,893.31	13,893.31
Perikanan	9,822.50	6,210.13	16,032.63
Total Sektor Ekonomi Produktif	28,117.71	2,867,363.45	2,895,481.16

4. **Kerusakan dan Kerugian Sarana dan Prasarana Sosial**, yang meliputi fasilitas pendidikan yang mencapai lebih dari 200 unit sekolah, 33 puskesmas dan pustu serta 3 rumah sakit, fasilitas keagamaan, serta fasilitas sosial lainnya.
5. **Kerusakan dan Kerugian Sektor Lainnya**, tercatat bencana banjir mengakibatkan kerusakan di sejumlah kantor pemerintahan, fasilitas keamanan dan ketertiban, serta kerusakan dan kerugian yang bersifat langsung (*direct damage and loss*) yang diharapi sektor keuangan dan perbankan.

Secara keseluruhan nilai kerusakan dan kerugian dapat dilihat pada tabel berikut. Dari seluruh perkiraan yang hampir mencapai Rp5,2 triliun, belum termasuk kerugian ekonomi yang dialami oleh sektor usaha dan asuransi yang diperkirakan senilai 400 juta USD atau setara dengan Rp3,6 triliun selama 7-10 hari terjadinya bencana banjir di wilayah Jabodetabek ini. Dari perhitungan kerusakan dan kerugian yang bersifat langsung (*direct impact*) sebesar Rp5,2 triliun, sejumlah Rp4,5 triliun merupakan aset milik swasta/masyarakat, dan selebihnya Rp650 miliar merupakan kerusakan dan kerugian dari aset milik pemerintah/BUMN/BUMD (terinci dalam Tabel 5).

Tabel 5
Ringkasan Hasil Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Banjir Jabodetabek, Februari 2007

SEKTOR & SUB SEKTOR	NILAI (MILYAR RUPIAH)						KEPEMILIKAN			
	KERUSAKAN	%	KERUGIAN	%	TOTAL	%	PEMERINTAH	%	SWASTA/MASY	%
I PERUMAHAN	1,298.92	73.56	0.00	0.00	1,298.92	25.05	0.00	0.00	1,298.92	28.64
II INFRASTRUKTUR	327.97	18.57	525.84	15.38	853.81	16.47	533.81	82.20	320.00	7.06
A TRANSPORTASI DARAT										
1. JALAN DAN JEMBATAN	257.02				257.02		257.02			
2. KERETA API	14.13		9.24		23.37		23.37			
3. JALAN TOL			1.00		1.00		1.00			
4. TRANS JAKARTA & ORGANDA			320.00		320.00				320.00	
B ENERGI	22.77		175.60		198.37		198.37			
C POS DAN TELEKOMUNIKASI			18.00		18.00		18.00			
D AIR DAN SANITASI	15.40		2.00		17.40		17.40			
E INFRASTRUKTUR PERTANIAN	18.65				18.65		18.65			
III SOSIAL	44.03	2.49	4.90	0.14	48.76	0.94	48.76	7.51	0.00	0.00
1. PENDIDIKAN	9.36		4.90		14.26		14.26			
2. KESEHATAN	0.175				0.175		0.18			
3. PERIBADATAN	34.33				34.33		34.33			
4. LEMBAGA SOSIAL	0.17									
IV EKONOMI	28.12	1.59	2,867.36	83.87	2,895.48	55.85	0.00	0.00	2,895.48	63.85
1. USAHA/INDUSTRI B/KM/MIKR	14.18		2,775.00		2,789.18				2,789.18	
2. PERDAGANGAN	1.02		61.25		62.27				62.27	
3. PARIWISATA	0.00		0.00		0.00				0.00	
4. PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN	12.92		31.12		44.03				44.03	
VI LINTAS SEKTOR	66.85	3.79	20.60	0.60	87.45	1.69	66.85	10.29	20.60	0.45
1. PEMERINTAHAN	0.32				0.32		0.32			
2. LINGKUNGAN HIDUP					0.00		0.00			
3. KEAMANAN & KETERTIBAN	66.53				66.53		66.53			
4. KEUANGAN DAN PERBANKAN			20.60		20.60				20.60	
TOTAL	1,765.89	34.06	3,418.70	65.94	5,184.43	100.00	649.43	12.53	4,535.00	87.47

Keterangan:

*) Kerusakan dalam Sektor Ekonomi, sub-sektor Perdagangan hanya mencakup pasar tradisional, tidak mencakup pasar modern/supermarket/mall.

D. DAMPAK TERHADAP PEREKONOMIAN REGIONAL DAN NASIONAL

Mengingat pertumbuhan ekonomi wilayah *Bogor-Depok-Bekasi* dan *Tangerang* didukung oleh sektor industri pengolahan yang dominan dibandingkan sektor lainnya, maka dampak bencana banjir secara signifikan berpotensi menurunkan pertumbuhan PDRB daerah *Bogor-Depok-Bekasi* sebesar 1,33% dan *Tangerang* sebesar 2,62%.

Perekonomian Provinsi DKI Jakarta diperkirakan tidak mengalami penurunan yang signifikan karena karena kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta adalah sektor keuangan dan jasa, tetapi dampak banjir berpotensi menurunkan pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta 0.59% pada sektor industri dan perdagangan (rincian pada Tabel 6).

Tabel 6
Estimasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Besar Kerugian di Wilayah JABODETABEK
(harga konstan tahun 2000, Rp miliar)

Provinsi/ Nasional	2006	2007				
	PDRB / PDB **)	PDRB / PDB **)	Rasio PDRB terhadap PDB Nasional (%)	Rasio Kerugian per Propinsi ***) (%)	Besar Kerugian per Propinsi ****)	Penurunan Pertumbuhan PDRB / PDB (%)
DKI Jakarta	311,510	331,135	16.88	49.00	1,827.19	0.59
Bo-De-Bek (Kab/Kot)	75,561	80,322	4.09	27.00	1,006.82	1.33
Tangerang (Kab/Kot)	34,153	36,305	1.85	24.00	894.95	2.62
Total	421,225	447,762	0.23	100.00	3,728.96	0.89

Catatan:

**) Angka hasil analisa.

***) Rasio luas daerah Jabodetabek yang terendam digunakan sebagai acuan untuk menentukan besarnya rasio kerugian yang diderita oleh masing-masing propinsi.

****) Angka kerugian dideflasikan agar dapat dibandingkan dengan PDRB harga konstan Tahun 2000.

Jika bencana banjir di wilayah Jabodetabek tidak berkepanjangan, maka diperkirakan tidak akan ada dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional, mengingat nilai kerusakan dan kerugian secara keseluruhan (langsung dan tidak langsung) sebesar Rp8,7 triliun yang diderita wilayah Jabodetabek pascabencana banjir hanya memberikan kontribusi sebesar

0.46% terhadap PDRB Nasional. Selain itu, cepatnya masa pemulihan juga akan memperkecil dampak kerugian terhadap perekonomian nasional.

E. KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Bencana banjir yang telah terjadi di Jakarta pada tahun 1996, 2002, dan yang baru saja terjadi di awal Februari 2007 telah cukup merupakan pelajaran yang berharga bagi kita semua, termasuk Pemerintah dan pemerintah daerah karena telah menimbulkan kerugian dan dampak yang tidak kecil bagi perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.

Oleh karena itu upaya untuk menghindarkan bencana serupa di masa datang haruslah dihindarkan, melalui tindakan-tindakan dan perencanaan yang koordinatif dan tepat mulai dari sekarang.

Dalam maksud tersebut, tindakan perencanaan dan upaya penanggulangan banjir selanjutnya akan menindaklanjuti 11 (sebelas) arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet Terbatas tanggal 9 Februari 2007, serta menindaklanjuti dan mengoordinasikan hasil-hasil Rapat Koordinasi Pengelolaan Dampak Bencana Banjir dipimpin oleh Wakil Presiden RI di Gedung BKKBN, Halim, tanggal 10 Februari 2007, terutama untuk pelaksanaan tanggap-darurat, rencana-rencana jangka pendek, rencana-rencana jangka menengah dan panjang.

1. Upaya-upaya tanggap darurat dan pascabanjir telah dan sedang dijalankan oleh Pemda DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, dan departemen-departemen terkait seperti Departemen Kesehatan, departemen Sosial, demikian pula Bakornas bekerja sama dengan Satkorlak masing-masing daerah. Upaya-upaya tanggap darurat juga dilaksanakan oleh unsur-unsur TNI-Polri, LSM, dunia internasional, maupun masyarakat sendiri.
2. Dalam rencana-rencana jangka pendek, atau tahunan, Bappenas mengoordinasikan perencanaan kegiatan-kegiatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar terpadu dan sinergis.
3. Dalam sektor prasarana ke-PU-an khususnya di bidang sumber daya air, akan disusun rencana mendesak program pemeliharaan saluran drainase alam dan buatan di wilayah perkotaan Jakarta dan sekitarnya, serta rencana pemanfaatan sumber daya air terpadu termasuk penyelamatan dan konservasi sumber daya air di wilayah Jabodetabek, termasuk rencana tindak pengelolaan DAS Ciliwung dan DAS Cisadane;

4. Dalam upaya penataan perkotaan, Pemerintah akan mendorong penyediaan perumahan susun bagi masyarakat yang berada di kawasan kumuh, padat penduduk di bantaran sungai.
5. Dalam jangka menengah dan jangka panjang diupayakan penataan kembali tataruang Jabodetabek. Sambil menunggu hasil revisi UU Penataan Ruang di DPR-RI, Pemerintah berupaya mempercepat penetapan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Jabodetabekpunjur melalui Peraturan Presiden (Perpres). Rapat koordinasi terakhir BKTRN tanggal 16 Februari 2007 lalu telah menghasilkan kesepakatan seluruh daerah dengan rumusan materi.
6. Selanjutnya semua pemerintah daerah yang wilayahnya tercakup dalam wilayah Perpres Penataan Ruang Jabodetabekpunjur diharapkan akan melakukan revisi RTRW-nya masing-masing sesuai dengan Perpres tersebut kelak.
7. Pemerintah akan meninjau kembali dan menyempurnakan Rencana Induk Pengendalian Banjir Jabodetabek yang telah disepakati Pemerintah Pusat dan ketiga pemerintah daerah provinsi di wilayah Jabodetabek di tahun 2002.
8. Menyusun rencana aksi pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana banjir di wilayah Jabodetabek, sebagai tindaklanjut hasil penilaian atas kerusakan dan kerugian ini.

Jakarta, 19 Februari 2007

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas

H. Paskah Suzetta